

RASA KEBANGSAAN PADA MAHASISWA ASAL WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA

Mardawani

STKIP Persada Khatulistiwa Sintang Jl. Pertamina-Sengkuang

e-mail: mardawani113@yahoo.co.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Rasa Kebangsaan pada Mahasiswa Asal Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian studi kasus. Data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil wawancara, angket, lembar observasi dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa asal wilayah perbatasan, yakni faktor ekonomi, kedekatan jarak tempuh, sejarah masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang belum memadai. Pada hakikatnya rasa kebangsaan mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tergolong baik. mahasiswa memiliki tekad tetap terintegrasi ke dalam NKRI yang ditunjukkan dalam wujud sikap nasionalisme dan kecintaan terhadap identitas nasional. Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat dalam membina rasa kebangsaan pada masyarakat perbatasan.

Kata kunci: rasa kebangsaan, wilayah perbatasan

Abstract: The purpose of study to know how Nationalisme at Student Region Frontier of Indonesia-Malaysia? This is a case study. The data are obtained by using interview, questionnaire, observation sheet and documentation. Based on data processing it can be concluded that there are 4 challenges faced by students at the frontier region, namely economic factors, contiguity of travelled distance, society history, and development of infrastructure which is not adequate yet. Basically the the nationalism of students at the borderline of Indonesia-Malaysia pertained goodness. Student have intention remain to integrate into *NKRI* posed at in the form of nationalism attitudes and love to national identity. As a result of this study, it is expected that the roles of the central and the local government to develop character and the nationality of the society living in the borderline.

Keyword: nationalism, regional of frontier

Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dan vital dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara geografis kawasan perbatasan, umumnya memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar karena kedekatan jaraknya dengan Negara tetangga. Adapun keadaan vital menunjukkan fakta secara geopolitik bahwa kawasan perbatasan berkaitan dengan aspek kedaulatan Negara, pertahanan dan

keamanan, rasa kebangsaan, ideologi sosial, ekonomi dan politik.

Namun fakta yang dialami Indonesia ternyata berbeda. Hampir seluruh wilayah perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia berada dalam masyarakat terbelakang (*Marginalized Society*). Kurangnya sarana-prasarana pendidikan, kesehatan, keterbatasan transportasi, terbatasnya sarana komunikasi, pos-pos pengamanan daerah perbatasan dan aparat

keamanan di perbatasan sebagai indikasi bahwa bangsa kita belum maksimal dalam menangani masalah perbatasan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, secara khusus, Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara Malaysia sering kali dihadapkan pada suatu kondisi dimana masyarakatnya saling berinteraksi baik dalam konteks kehidupan sosial ekonomi maupun budaya. Di satu sisi, proses interaksi tersebut dapat mendatangkan kebermanfaatn bagi kedua belah pihak, namun di sisi lain juga dapat mendatangkan dampak negatif, missal-nya muncul gejala semakin memudarnya rasa cinta masyarakat akan bangsa dan negara Indonesia yang ditampilkan dalam sikap dan tindakan yang nyata seperti menggunakan lambang negara, lagu kebangsaan dan kecintaan akan produk Indonesia yang semakin berkurang.

Melihat fenomena di atas, peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang "rasa kebangsaan pada mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia" pada STKIP Per-sada Khatulistiwa Sintang.

Secara umum berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "bagaimanakah rasa kebangsaan mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia?"

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih terarah, maka rumusan masalah di atas

dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia?
2. Bagaimanakah perwujudan rasa kebangsaan dalam Kehidupan sehari-hari mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia?
3. Bagaimanakah tanggapan mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia terhadap Integrasi Nasional?

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
2. Perwujudan rasa kebangsaan dalam Kehidupan sehari-hari mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
3. Tanggapan mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia terhadap Integrasi Nasional.

Rasa kebangsaan pada umumnya dapat diartikan sebagai perasaan yang dimiliki seseorang untuk mencintai bangsa dan negaranya. Rasa kebangsaan tercermin pada perasaan rakyat, masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia yang dalam perjalanan hidupnya menuju cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara khusus, Rustri (2012) menyebutkan bahwa secara garis besar wawasan kebangsaan

memiliki komponen utama yaitu rasa kebangsaan, faham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan merupakan perekat utama kesatuan dan persatuan masyarakat dan bangsa dalam wadah NKRI. Faham kebangsaan merupakan pembeda dengan bangsa lain. Sementara semangat kebangsaan merupakan landasan dari perasaan kebangsaan dan paham kebangsaan.

Sejalan dengan pendapat Rustri di atas, Yulianto (2012), menambahkan bahwa wawasan kebangsaan dari sudut pandang implementasi etika moral dapat membangun komitmen kebangsaan. Untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, terutama pada generasi muda diperlukan perasaan solidaritas sosial dan semangat multikulturalisme yang melekat pada masyarakat. Memperkuat komitmen kebangsaan sebagai upaya membangun karakter bangsa dalam penguatan jati diri dan identitas bangsa. Dalam membangun semangat nasionalisme dan paham kebangsaan harus berakar pada potensi kekayaan lokal bangsa, dan dibangun di atas wacana paham pluralisme. Dengan demikian fondasi paham kebangsaan terbangun melalui semangat persatuan sebagai bangsa yang multikultur di tengah globalisasi dunia

Komitmen moral bangsa Indonesia dalam membentuk paham kebangsaan yang tertinggi adalah idiologi Pancasila, dan itu sudah final. Hal ini sejalan dengan pendapat Hendro (2012: 3), Pancasila harus dipahami

sebagai ideologi bangsa yang harus menjadi *way of life* bangsa. Karena Pancasila merupakan hasil rumusan para *founding father's* bangsa, yang melihat Indonesia dengan berbagai kompleksitas yang ada.

Sementara itu, bagi masyarakat perbatasan, pengetahuan akan rasa kebangsaan dan komitmen kebangsaan berkaitan dengan nilai-nilai dasar bernegara sangatlah minim. Menurut Syarwi (2011: 2) memudarnya rasa kebangsaan bagi bangsa selama beberapa tahun belakangan ini, sesungguhnya disulut oleh menguatnya sentimen kedaerahan dan semangat primordialisme pascakrisis. Suatu sikap yang sedikit banyak disebabkan oleh kekecewaan sebagian besar anggota dan kelompok masyarakat bahwa kesepakatan bersama (*contract social*) yang mengandung nilai-nilai seperti keadilan dan perikemanusiaan dan musyawarah kerap hanya menjadi retorika kosong.

Menurut Syarwi (2011:1), secara umum terdapat tiga cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat rasa nasionalisme kebangsaan Indonesia sebagai upaya menghindari disintegrasi bangsa, sehingga sila Persatuan Indonesia dapat diwujudkan. Tiga cara tersebut, yakni melakukan sosialisasi nasionalisme Indonesia secara terus menerus. Kedua, meningkatkan pembangunan ekonomi. Ketiga, menghilangkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Sosialisasi rasa kebangsaan Indonesia, merupakan proses penanaman nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh warga negara, terutama bagi generasi muda. Penanaman nilai-nilai dapat dilakukan dengan memberikan informasi mengenai perjuangan kemerdekaan, sejarah tokoh-tokoh nasional dan penghormatan terhadap simbol-simbol kebangsaan. Sarana yang digunakan untuk sosialisasi tersebut, bisa melalui keluarga, sekolah, media massa, instansi pemerintah dan spanduk/poster. Kegagalan pembangunan ekonomi merupakan sumber masalah sejumlah suku bangsa yang mendorong mereka keluar dari negara yang ada dan berupaya membentuk negara sendiri (Syarwi, 2011:2).

Wilayah perbatasan adalah wilayah yang berbatasan langsung, baik darat, laut, udara, maupun perairan diantara kedua Negara (Hadiwijoyo: (2009:2). Berbagai permasalahan seperti perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang jasa (*smuggling*), pembalakan liar (*illegal lodging*), perdagangan manusia anak-anak dan wanita (*human trafficking*) menjadi fenomena kontemporer kejahatan lintas Negara yang tidak mudah ditanggulangi (Syaifullah, (2009: 5).

Kondisi wilayah perbatasan Indonesia terlihat seperti tidak banyak kemajuan, sementara negara Malaysia semakin memperlihatkan kemajuan begitu pesat. Dari perspektif sejarah, lambatnya perkembangan

pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia yang berimplikasi terhadap kemiskinan masih pada masyarakat perbatasan, dipicu oleh pembangunan yang mengutamakan pendekatan keamanan (*security approach*). Masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, masih merasa takut sehingga di sejumlah daerah, kawasan perbatasan tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan nasional yang memadai.

Dalam konteks perbatasan, seperti Kalimantan Barat dan Serawak, kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antara kedua wilayah Negara, telah menjadi pemicu orientasi perekonomian masyarakat perbatasan ke Negara tetangga. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya, jalan menuju ke Malaysia ternyata jauh lebih mudah bilamana dibandingkan dengan Ibu kota Kecamatan/Kabupaten di wilayah.

Sejalan dengan itu, dalam penelitian, Lahnasafitra (2011) dikemukakan bahwa ada tiga persoalan di wilayah perbatasan. Pertama, dimensi lokal dapat dilihat dari adanya kesenjangan pendapatan yang begitu jauh antara penduduk di kawasan perbatasan dengan Negara tetangga. Kedua, permasalahan berdimensi nasional. Sepanjang jalur perbatasan, misalnya di Kalimantan Barat saja, diperkirakan melebihi cakupan wilayah daratan dari 2000 km, dengan sekitar 53 titik pos pengawasan, melintas antara Entikong, Paloh Sajingan, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Kapuas

Hulu. Suatu rentang luas wilayah darat yang sukar di tempuh untuk berbagai kepentingan secara sosial ekonomi dan juga pertahanan dan keamanan.

Masyarakat perbatasan yang tertinggal secara sosial dan ekonomi tersebut tidak jauh berbeda dengan nasib petugas keamanan, polisi dan tentara bertugas menjaga kedaulatan Negara begitu panjang dan luas. Tanpa tunjangan khusus, gaji mereka perbulannya hanya akan cukup untuk beberapa minggu oleh karena standar harga barang-barang yang untuk dikonsumsi begitu mahal harganya. Tidak mengherankan penerapan kedaulatan di wilayah perbatasan menjadi bagian yang tidak terawasi. Masyarakat perbatasan mudah terprovokasi untuk melakukan kegiatan ilegal seperti mengeksploitasi sumber daya hutan, penyelundupan barang-barang jasa dengan pemasaran di Kucing, Serawak, Malaysia.

Ketiga, masalah berdimensi internasional. Kebijakan dunia internasional dalam menangani sengketa perbatasan Indonesia sering tidak netral, misalnya sengketa pulau, tapal batas, perlakuan terhadap TKI dan masih banyak lagi persoalan lainnya.

Masalah isu perbatasan sudah ada sejak Indonesia merdeka tahun 1945, namun sampai saat ini belum juga mendapatkan solusi yang tepat. Beberapa peristiwa terjadi antara Negara Indonesia dengan negara lain, secara khusus dengan Negara Malaysia;

misalnya sengketa Ambalat, Sipadan Ligitan, Pulau Sebatik, pergeseran tapal batas di beberapa daerah, perlakuan terhadap TKI, klaim terhadap budaya, makanan dan sebagainya. Pengertian perbatasan selama ini lebih banyak dipahami dalam konteks fisik.

Dalam menangani masalah wilayah perbatasan, bentuk-bentuk kehadiran Negara, seperti penyediaan sarana dan prasarana listrik, telekomunikasi, air bersih, koperasi unit desa, jaringan transportasi, jaringan informasi, terutama penyiaran jauh yang lebih memadai.

Selanjutnya, menurut Thontowi (2011), Sebagai pintu gerbang batas internasional, Pusat Pengembangan Perbatasan, atau *Border Development Center*, dapat mengubah citra masyarakat terbelakang (*Marginalized Society*) menjadi halaman terdepan masyarakat internasional lebih terbuka (*Front Gate of International Society*). Saat ini, masyarakat wilayah perbatasan harus siap meninggalkan nilai-nilai budaya feodalistik yang biasanya mengalami benturan dengan tuntutan masyarakat moderen yang mampu berfikir rasional, kritis dan obyektif. Menerima nilai-nilai pembaruan dan siap bersaing berbasis kompetensi dan profesionalisme. Integritas moral yang luhur, disiplin dan kerja keras, serta menjunjung tinggi kesadaran hukum adalah perangkat

lunak yang hendaknya dipersiapkan. Agar ketimpangan potensi penduduk perbatasan negara tetangga Malaysia dapat segera disejajarkan. Sarana-prasarana jalan-jalan besar, telekomunikasi, kendaraan roda empat, dan berbagai fasilitas modern telah mulai menyambungkan batas wilayah kedua Negara dalam suatu *gentlemen agreement* antara kedua Negara. Karena fasilitas yang tidak memadai, tidak heran jika orientasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga lebih banyak ke Malaysia (Syaifullah, 2009:2).

Penduduk disekitar wilayah perbatasan yang umumnya mata pencaharian mereka sebagai petani ladang berpindah dapat berkomunikasi untuk menukarkan hasil produksi pertanian dan perkebunan mereka dengan kebutuhan sehari-harinya.

Dari segi keamanan dan pertahanan masing-masing Negara, Pos Lintas Batas (PLB) menjadi sangat penting. Posisi pemerintah Kecamatan merupakan aparat pemerintah tingkat Kabupaten yang ada di berbagai daerah dengan harapan jarak rentang pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat dan efisien. Adapun kewenangan yang selama diperankan adalah bidang pemerintahan, pelayanan segala kebutuhan masyarakat yang dapat didelegasikan kepada kepala-kepala desa. Kemudian kewenangan pembinaan pemerintah desa, urusan sosial dan ekonomi serta hal-hal yang terkait dengan kewenangan

koordinatif. Misalnya ada yang disebut Urusan Pokok dan Tugas (UPT), Kantor Urusan Agama, UPT Kantor Pendidikan Nasional. Selain itu, dalam pemerintahan kecamatan dilengkapi dengan koordinasi antara aparat keamanan dan ketertiban seperti polisi (Polsek), Ko-mando Rayon Militer (Koramil). Model pelayanan publik semacam ini pada umumnya tidak dijumpai perbedaan fundamental. Saat ini, perlu kelengkapan aparat pemerintah juga disertai dengan adanya aparat Imigrasi, Kantor Bea Cukai, Quarantina, dan bahkan satuan Militer untuk menjaga dan memelihara keamanan dan pertahanan, ketuhanan dan kedaulatan Negara.

Di beberapa wilayah perbatasan, saat ini meskipun belum operasional secara penuh kantor imigrasi dan kantor penjagaan (LIBAS) telah berjalan secara efektif. Situasi ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan juga atas dasar MoU antara kedua Negara, tidak dapat ditunda untuk diberlakukan. Kelancaran komunikasi bisnis seperti itu memang saling menguntungkan kedua pihak oleh karena dengan transaksi langsung harga dan penggunaan nilai tukar dapat dilakukan dengan kesepakatan atau cara-cara yang sudah lazim. Penggunaan uang rupiah atau ringgit Malaysia tidak menjadi hambatan.

Dalam beberapa bidang pelayanan publik, peran pemerintahan di tingkat Kecamatan secara fisik telah tersedia dengan

memadai. Misalnya selain kantor kecamatan, UPT pendidikan, KUA, kantor imigrasi, kantor Kapolsek dan juga kantor Koramil. Dalam sekitar kesehatan juga telah tersedia, unit pelayanan umum seperti Puskesmas dan rumah-rumah untuk dokter.

Pelayanan public sering menimbulkan ketidakpuasan masyarakat adalah peran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Rendahnya kualitas pelayanan publik yang minimum terjadi disebabkan oleh beberapa factor. Di satu pihak, jumlah SDM yang sangat terbatas dan tingkat kehadiran SDM yang telah tersedia di kantor-kantor pemerintahan seringkali menjadi factor utama. Misalnya, aparat pemerintah di kecamatan dan dokter-dokter tidak dapat tinggal dengan betah di wilayah perbatasan karena letaknya yang terisolasi. Situasi ini sangat penting untuk segera ditanggulangi oleh pemerintah.

Pemerintah harus mengubah orientasi pembangunan perbatasan dari pendekatan ekonomi ke pendekatan *national interest*. Utamakan kepentingan nasional mempertahankan kedaulatan dan martabat bangsa, ketimbang kepentingan kapitalistik (Thontowi, 2011: 7). Secara khusus, masalah umum yang dihadapi di kawasan perbatasan diupayakan oleh pemerintah daerah seperti yang tertera dalam Restra Pembangunan Kawasan Perbatasan Kab Sintang Tahun 2009-2014 mencakup 6 bidang, yakni: (1). transportasi dan sarana prasarana wilayah

lainnya; (2). bidang pendidikan; (3). Sikap dan persepsi masyarakat; (4). bidang ekonomi; (5). bidang politik dan keamanan; dan (6). bidang kesehatan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan bentuk penelitian study kasus. Metode ini dipilih berdasarkan permasalahan yang muncul dari adanya suatu kasus yang terjadi. Jumlah responden adalah 30 mahasiswa yang berasal dari 3 wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yakni masing-masing 10 orang, yakni Kecamatan Entikong (Sanggau), Kecamatan Ketungau Hulu (Sintang), dan Kecamatan Semitau (Kapuas Hulu). Dalam rangka membantu mekanisme kerja peneliti maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung. Alat pengumpul data berupa panduan observasi, panduan wawancara dan angket.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif memanfaatkan persentase hanya merupakan langkah awal dari proses analisis data (Arikunto, 2009: 352). Dalam proses analisis data kualitatif terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu catatan lapangan, pengumpulan informasi, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan (Miles dan

Huberman, 1992: 16-21). Proses analisis data dilakukan secara simultan yang mencakup klarifikasi, interpretasi dan analisis data. Analisis data dilakukan secara deskriptif (*descriptive analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian ini ditemukan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

Tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia

Dari hasil pengolahan hasil angket dan wawancara terhadap 30 mahasiswa STKIP-PK Sintang yang berasal dari wilayah perbatasan (Kecamatan Entikong, Kecamatan Ketungau Hulu dan Kecamatan Semitau) dapat ditelaah bahwa sesungguhnya masyarakat di wilayah perbatasan menghadapi berbagai tantangan terkait dengan interaksi antara masyarakat kedua negara. (1). Faktor ekonomi, ketertinggalan Negara Indonesia secara khusus masyarakat perbatasan secara ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi kecintaan masyarakat terhadap komitmen kebangsaan. (2). Jarak tempuh yang lebih dekat ke Negara Malaysia menjadi penyebab utama masyarakat perbatasan lebih memilih Malaysia sebagai tujuan. (3). Faktor sejarah, kesamaan asal usul (Negara serumpun) yang menyebabkan adanya ikatan secara psikologis dan sosial. (4). Pembangunan infrastruktur

Negara Malaysia yang jauh lebih memadai dibandingkan Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat perbatasan.

Namun demikian, secara positif bahwa keempat tantangan tersebut justru menjadi motivasi utama bagi sebagian besar mahasiswa asal wilayah perbatasan untuk berupaya meningkatkan kualitas diri agar lebih dapat bersaing mengatasi permasalahan ekonomi, SDM, budaya, politik dan pembangunan yang lebih baik lagi.

Perwujudan Rasa Kebangsaan dalam Kehidupan Sehari-hari Mahasiswa Asal Perbatasan Indonesia-Malaysia.

Dari hasil pengolahan data dapat dipaparkan bahwa perwujudan rasa kebangsaan mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ditunjukkan dengan beberapa sikap, diantaranya yaitu: (1). Penggunaan lambang Negara, seperti lagu kebangsaan, pengibaran bendera merah putih, dan bahasa nasional. (2). Peringatan hari-hari besar nasional, seperti upacara bendera setiap hari peringatan nasional misalnya 17 Agustus, hari sumpah pemuda, hari pahlawan, hari pendidikan, dan sebagainya. (3). Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam situasi-situasi resmi sebagai bahasa pergaulan. (4). Memilih produk dalam negeri sebagai prioritas, serta berupaya menjaga nilai-nilai Pancasila dalam praktek kehidupan sehari-harinya.

Pancasila dalam praktek kehidupan sehari-harinya.

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat perbatasan memiliki kecenderungan memahami secara konsep tentang rasa kebangsaan. Hasil inter-prestasi data ditemukan bahwa secara konseptual pengetahuan mahasiswa asal wilayah perbatasan akan rasa kebangsaan cukup tinggi. Bahkam terungkap bahwa kenyataan yang terjadi selama ini bukan merupakan persoalan indikator tinggi-rendahnya rasa kebangsaan, melainkan lebih merupakan kebutuhan akan persoalan ekonomi, keadaan terisolirnya wilayah perbatasan akibat sarana dan prasarana yang tidak memadai menjadi titik pangkal persoalan masyarakat perbatasan memilih untuk ke Negara Malaysia.

Tanggapan Mahasiswa Asal Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia Terhadap Integrasi Nasional

Berdasarkan temuan penelitian, seluruh responden menyatakan bahwa integrasi nasional adalah suatu keharusan, bagi mereka NKRI adalah harga mati. Walaupun keberadaan wilayah perbatasan dengan segala aspek permasalahannya, mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk tetap mencintai tanah air dan bangsanya. Salah satu bukti adanya keinginan besar mereka untuk tetap memilih menimba ilmu di Kabupaten Sintang yang

jarak tempuh lebih jauh dan membutuhkan dana yang lebih tinggi ke Negara Malaysia. Selain itu, dalam menanggapi isu-isu yang terkait dengan disintegrasi bangsa, mahasiswa tetap memilih membela Indonesia dan tetap setia dalam NKRI.

Meskipun di satu sisi, sebagian mahasiswa memiliki rasa kecewa terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang menjadi polemik perbatasan, seperti sengketa tapal batas, pembangunan infrastruktur yang tidak memadai, kesenjangan kehidupan sosial ekonomi yang semakin tinggi antara wilayah perbatasan dengan pusat.

Sebagaimana yang terhimpun dari data wawancara, mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia sangat mendambakan adanya program yang lebih maksimal lagi dari pemerintah. Penyelesaian masalah sengketa perbatasan secara tuntas tidak hanya sebatas konsep seperti yang terjadi selama ini. Ketegasan pemerintah dalam menentukan sikap saat sengketa terjadi juga sangat dibutuhkan. Peningkatan status sosial ekonomi masyarakat, penetapan harga yang layak bagi hasil pertanian sebagai mata pencaharian masyarakat perlu dipertimbangkan pemerintah, karena sangat berdampak pada kelayakan hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengolahan data, analisis data dan interpretasi pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan secara umum bahwa : “rasa kebangsaan mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tergolong baik”. Se-cara khusus, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia terdiri dari 4 faktor, yakni: (1). Faktor ekonomi, ketertinggalan Negara Indonesia secara khusus masyarakat perbatasan secara ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi kecintaan masyarakat terhadap komitmen kebangsaan. (2). Jarak tempuh yang lebih dekat ke Negara Malaysia menjadi penyebab utama masyarakat perbatasan lebih memilih Malaysia sebagai tujuan, (3). Faktor sejarah, kesamaan asal usul (Negara serumpun) yang menyebabkan adanya ikatan secara psikologis dan sosial, (4). Pembangunan infra-struktur Negara Malaysia yang jauh lebih memadai dibandingkan Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat perbatasan.
- b. Wujud rasa kebangsaan dalam Kehidupan sehari-hari mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ditunjukkan dengan fakta bahwa ditunjukkan dengan beberapa sikap,

diantaranya yaitu: (1). Penggunaan lambang Negara, seperti lagu kebangsaan, pengibaran bendera merah putih, dan bahasa nasional, (2). Peringatan hari-hari besar nasional, seperti upacara bendera setiap hari peringatan nasional misalnya 17 Agustus, hari sumpah pemuda, hari pahlawan, hari pendidikan, dan sebagainya, (3). Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam situasi-situasi resmi sebagai bahasa pergaulan, (4). Memilih produk dalam negeri sebagai prioritas, serta berupaya menjaga nilai-nilai Pancasila dalam praktek kehidupan sehari-harinya.

- c. Mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia memiliki tekad untuk tetap terintegrasi dalam NKRI dan anti terhadap disintegrasi nasional. Terbukti dari keinginan besar mereka untuk tetap memilih menimba ilmu di Kabupaten Sintang yang jarak tempuh lebih jauh dan membutuhkan dana yang lebih tinggi ke Negara Malaysia. Selain itu, dalam menanggapi isu-isu yang terkait dengan disintegrasi bangsa, mahasiswa tetap memilih membela Indonesia dan tetap setia dalam NKRI.

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, secara umum peneliti sarankan agar semua pihak terkait khususnya pemerintah baik pusat maupun daerah agar dapat memaksimalkan peran dalam mengatasi permasalahan baik infrastruktur pendidikan,

kesehatan, keamanan dan jalan yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan. Selain itu, kepada masyarakat perbatasan juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan rasa kebangsaan dan kecintaan terhadap NKRI dalam kehidupan sehari-harinya.

DAFTAR RUJUKAN

Arikunto Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Hadiwijoyo S, S. 2009. *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan, dan Penanganan (sebuah Tinjauan Empiris Yuridis)*. Yogyakarta: Gavamedia.

Miles, Mathew B dan Huberman, Michael. 1992. *Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Ten-tang Metode Baru*, Terjemahan Tjetjep Rohendy (2007), Jakarta: UI Press.

Syaifullah. 2009. *Nasionalisme di Tapal Batas, Sebatik Beranda yang Tak Terurus*. Kompas: Kalimantan Timur

Thontowi, J. 2011. *Penguatan Nasionalisme Kebangsaan Na-tion State*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.